

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK PUTUS  
SEKOLAH UNTUK PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI  
AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SEMBILAN KOTO KABUPATEN**



**Oleh: Lailatul Rahmi**

**NIM: 23204011016**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Magister (S2)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan

Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M. Pd.)

Program Studi Pendidikan Agama Islam

**YOGYAKARTA**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2625/Un.02/DT/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH UNTUK PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SEMBILAN KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL RAHMI, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 23204011016  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Sibawaihi, M.Ag., M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 68a90ec63e826



Penguji I

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 68a82a7eeab5



Penguji II

Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a513ee6ba1c



Yogyakarta, 12 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 68abdc10d40ef

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Rahmi  
Nim : 23204011016  
Jenjang : Magister  
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juli 2025

Saya yang menyatakan,

Lailatul Rahmi., S. Pd

NIM. 23204011016



## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Rahmi

Nim : 23204011016

Jenjang : Magister

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juli 2025

Saya yang menyatakan,

Lailatul Rahmi., S. Pd

NIM. 23204011016



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis saya yang berjudul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK PUTUS  
SEKOLAH UNTUK PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI  
AGAMA ISLAM DI KECAMATAN SEMBILAN KOTO KABUPATEN  
DHARMASRAYA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Lailatul Rahmi
Nim	:	23204011016
Jenjang	:	Magister (S2)
Prodi	:	Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd)

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Juli 2025

Pembimbing

Sibawaihi, S.Ag., M.Si., Ph. D

## ABSTRAK

**Lailatul Rahmi, NIM. 23204011016.** Perhatian Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan dan Nilai-nilai Agama Islam di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya. Tesis. Yogyakarta: Prosi Pendidikan Agama Islam Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Dharmasraya, khususnya di Kecamatan Sembilan Koto. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 9 Tahun, alokasi minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan, serta program bantuan pendidikan berupa BOS daerah dan beasiswa, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menanggulangi permasalahan anak putus sekolah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketidakmerataan akses pendidikan, tetapi juga melemahkan proses internalisasi nilai-nilai agama Islam pada generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari 19 Sekolah, 15 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), peserta didik, APS, masyarakat dan pemerintah (Dinas Pendidikan) melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah masih belum optimal. Hal tersebut tampak dari belum adanya kebijakan khusus yang diarahkan secara langsung untuk pencegahan anak putus sekolah, keterbatasan anggaran meskipun alokasinya telah memenuhi standar minimal 20% APBD, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan berbasis agama. Di sisi lain, guru PAI lebih banyak berperan pada aspek kognitif dalam pembelajaran sehingga belum maksimal dalam membangun kesadaran dan motivasi siswa agar tetap melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pendidikan formal dan pembinaan nilai-nilai Islam agar upaya penanggulangan anak putus sekolah dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** Anak Putus Sekolah, pemerintah daera, pendidikan Islam, nilai agama pemerataan Pendidikan.

## ABSTRACT

**Lailatul Rahmi, NIM. 23204011016.** The Role of Local Government in Addressing School Dropouts for Educational Equity and the Promotion of Islamic Values in Sembilan Koto Sub-District, Dharmasraya Regency. Thesis. Yogyakarta: Department of Islamic Education, Master's Program (S2), Faculty of Education and Teacher Training, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

This study was motivated by the high number of school dropouts in Dharmasraya Regency, particularly in Sembilan Koto District. Despite the local government having implemented various policies, such as the Regional Regulation on Compulsory Nine-Year Education, allocating a minimum of 20% of the Regional Budget (APBD) to the education sector, and educational assistance programs like the Regional BOS and scholarships, the reality on the ground shows that these policies have not fully addressed the issue of school dropouts. This phenomenon not only impacts the inequity of access to education but also weakens the internalization of Islamic values among the younger generation. Therefore, this study aims to analyze the role of the local government in addressing school dropouts by emphasizing the importance of integrating Islamic values into education. Using a descriptive qualitative approach, data was collected from 19 schools, 15 elementary schools (SD), 3 junior high schools, and 1 senior high school (SMA), students, APS, the community, and the government (Education Office) through observation, in-depth interviews, and documentation.

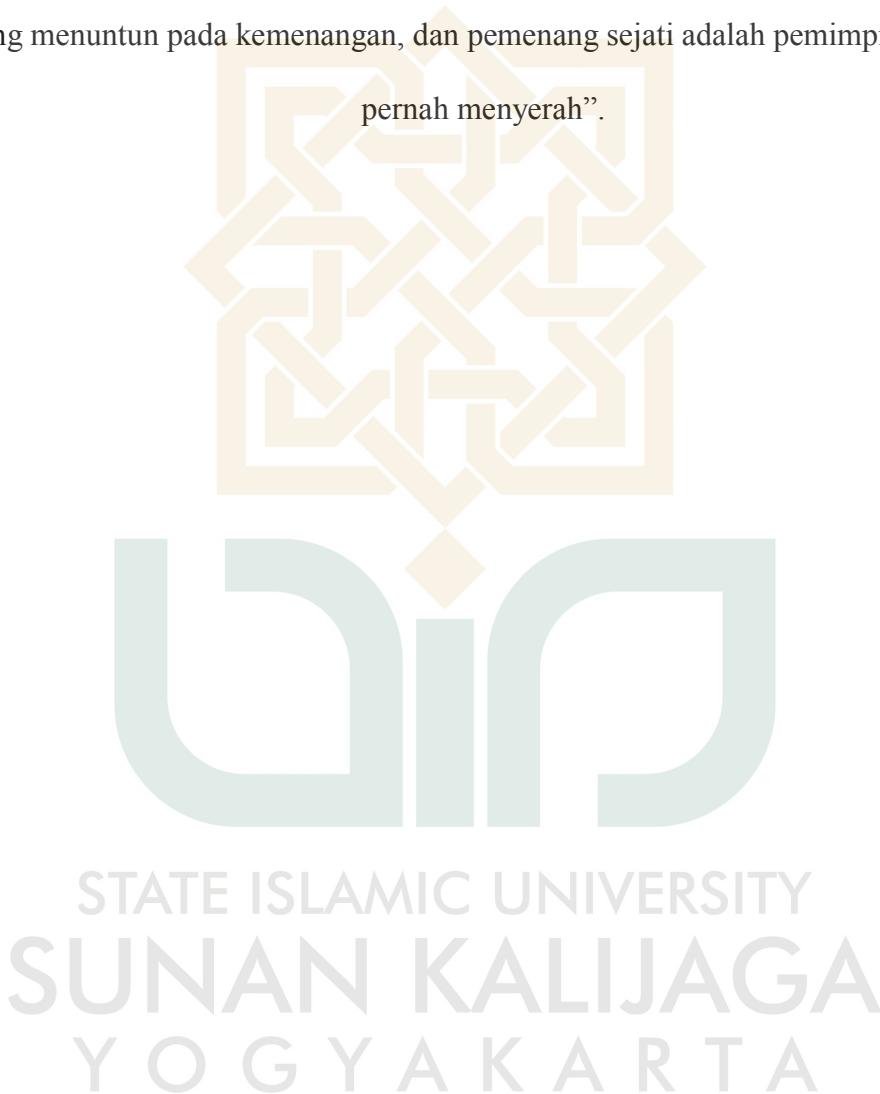
The results of the study indicate that the role of local governments in addressing school dropouts is still not optimal. This is evident from the absence of specific policies directly aimed at preventing school dropouts, budget constraints despite allocations meeting the minimum standard of 20% of the local budget, and weak coordination between local governments and religious-based educational institutions. On the other hand, PAI teachers focus more on cognitive aspects in teaching, resulting in insufficient efforts to build students' awareness and motivation to continue their education. Therefore, an integrated policy between formal education and the cultivation of Islamic values is needed to make efforts to address school dropouts more effective.

**Keywords:** School dropouts, local government, Islamic education, religious values, educational equity.

## MOTTO

“Ubah dirimu, maka Allah akan mengubah nasibmu. Bulatkan tekad, bertawakallah, dan yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Optimisme adalah iman yang menuntun pada kemenangan, dan pemenang sejati adalah pemimpi yang tak

pernah menyerah”.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk almamater tercinta saya:

Prodi Pendidikan Agama Islam Program Magister (S2)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perhatian Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan dan Nilai-nilai Agama Islam di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta kemudahan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.i., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena telah mengesahkan naskah tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan
3. Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik.

4. Bapak Sibawaihi, M.Si., Ph. D, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dinas Pendidikan, Kepala KUA, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling, Guru PAI, dan seluruh guru serta tenaga kependidikan di Kecamatan Sembilan Koto, yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan izin serta dukungan penuh dalam pengumpulan data penelitian ini.
6. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua dan saudara-saudara penulis, yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan membantu secara moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Pendidikan Agama Islam, yang telah berbagi pengalaman, diskusi ilmiah, dan dukungan selama masa perkuliahan dan penelitian.
8. Siapa saja yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.  
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam bidang kurikulum dan pembentukan karakter peserta didik.

Yogyakarta, Juli 2025

Penulis

Lailatul Rahmi., S. Pd  
NIM. 23204011016



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>xiii</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kajian Pustaka .....	16
E. Kerangka Teori .....	20
1. Peran Pemerintah Daerah .....	20
2. Anak Putus Sekolah (ATS) .....	24
3. Konsep nilai-nilai agama Islam dalam Pendidikan dan kaitannya dengan moralitas serta karakter anak .....	33
F. Metode Penelitian.....	47
G. Sistematika Pembahasan .....	53
<b>BAB II DESKRIPSI WILAYAH, KONDISI PENDIDIKAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya.....	55
1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya .....	55
2. Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya .....	56
3. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	57

4. Iklim dan Topografi .....	57
5. Keadaan Penduduk.....	59
6. Keadaan Ekonomi .....	60
<b>B. Gambaran Umum Kecamatan Sembilan Koto .....</b>	<b>61</b>
1. Keadaan Geografi dan Topografi.....	61
2. Keadaan Penduduk.....	63
<b>C. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Sembilan Koto .....</b>	<b>67</b>
1. Akses Pendidikan .....	67
2. Kualitas Pendidikan .....	70
<b>D. Tantangan dan Masalah Pendidikan .....</b>	<b>87</b>
1. Kesulitan geografis (daerah terpencil atau sulit dijangkau). .....	87
2. Kemiskinan .....	92
<b>BAB III ANALISIS ANAK PUTUS SEKOLAH, PERHATIAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>97</b>
A. Analisis Anak Putus Sekolah di Kecamatan Sembilan Koto .....	97
B. Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah .....	118
C. Analisis Peran Pemerintah Daerah .....	142
D. Analisis Upaya Pemerintah Daerah .....	149
E. Penerapan Nilai-nilai Agama Islam dalam Pendidikan .....	154
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>158</b>
A. KESIMPULAN.....	158
B. SARAN .....	159
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya dalam Rentang Waktu 2019-2020 .....	4
Tabel 1. 2 Partisipan Sekolah Kecamatan Sembilan Koto per 31 Desember 2024 .....	6
Tabel 2. 1 Kondisi Geografis Kabupaten Dharmasraya.....	57
Tabel 2. 2 Luas Daerah Menurut Desa/Nagari di Kecamatan Sembilan Koto 2024 ..	62
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024.....	63
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Sembilan Koto Berdasarkan Nagari 2024 ..	64
Tabel 2. 5 Jumlah Jorong menurut Desa/Nagari di Kecamatan Sembilan Koto 2024	66
Tabel 2. 6 Distribusi Sekolah di Kecamatan Sembilan Koto Menurut Tingkat Pendidikan 2025 .....	69
Tabel 2. 7 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendddikan di Kecamatan Sembilan Koto 2024-2025 .....	72
Tabel 2. 8 Fasilitas Pendidikan Tingkat SD di Kecamatan Sembilan Koto tahun 2025 .....	79
Tabel 2. 9 Harapan Lama Sekolah Sumatera Barat 2022-2024 .....	86
Tabel 2. 10 Daerah Kategori Terisolir dari SMP .....	89
Tabel 2. 11 Daerah Kategori Terisolir dari SMA .....	90
Tabel 3. 1 Data ATS di Kabupaten Dharmasraya 2025 .....	97

Tabel 3. 2 Data APS di Sekolah Dasar kecamatan Sembilan Koto Tahun 2020-2025 .....	100
Tabel 3. 3 Tidak Melanjutkan ke Jenjang SMP 2020-2025 .....	106
Tabel 3. 4 ATS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2020-2025 .....	109
Tabel 3. 5 Tidak Melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020-2025 .....	112
Tabel 3. 6 ATS Sekolah Menengah Atas Tahun 2020-2025 .....	114
Tabel 3. 7 Presentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama 2016-2020 .....	125
Tabel 3. 8 Partisipan Sekolah Kecamatan Sembilan Koto per 31 Desember 2024 ..	140



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya .....	60
Gambar 2. 2 Tata letak Kecamata Sembilan koto dalam Peta .....	61
Gambar 2. 3 Persentase Luas Wilayah berdasarkan Nagari/Kelurahan.....	63
Gambar 2. 4 Kondisi jalan menuju Nagari Lubuk Labu .....	68
Gambar 2. 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Dharmasraya 2014-2023 .....	81
Gambar 2. 6 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Dharmasraya 2014-2023 .....	83
Gambar 2. 7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Dharmasraya 2014-2023 .....	85
Gambar 2. 8 Peta Jarak Daerah terpencil ke Sekolah .....	88
Gambar 2. 9 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya 2014-2023 .....	93
Gambar 2. 10 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DI Kabupaten Dharmasraya .....	94
Gambar 3. 1 Tren APS per Tahun.....	117
Gambar 3. 2 Faktor-faktor Penyebab APA di Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya 2020-2025 .....	119
Gambar 3. 3 Peta Jarak Daerah Terpencil ke Sekolah .....	123

Gambar 3. 4 Jenjang Pendidikan IbuTahun 2025 ..... 133

Gambar 3. 5 Jenjang Pendidikan Ayah 2025 ..... 133



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas<sup>1</sup>. Pentingnya pendidikan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, dan layak. Pasal 34 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya<sup>2</sup>. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang menyatakan bahwa program wajib belajar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Yorizal Tri Marzuki Gulo, Beby Masitho Batubara, and Nina Angelia, ‘Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah Di Kampung Nelayan’, *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9.2 (2021), 1–8 <<https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5221>>.

<sup>2</sup> Peran Sukarelawan, Terhadap Anak, and Putus Sekolah, ‘, Mujizatullah3 Nur’, XI (2023), 297–303.

<sup>3</sup> Muhlis Madani and Risfaisal Risfaisal, ‘Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah’, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4.2 (2017), 184–93 <<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.500>>.

Meskipun regulasi telah menjamin pemerataan akses pendidikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah fenomena anak putus sekolah (APS). Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan pendidikan, melainkan juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya APS, antara lain Faktor pribadi mencakup karakteristik dan kondisi dalam diri anak yang dapat mendorong terjadinya putus sekolah. Beberapa faktor internal utama antara lain seperti rendahnya minat<sup>4</sup>, dan kurangnya motivasi belajar, ketidaksukaan terhadap sekolah, kesulitan belajar atau kemampuan kognitif yang terbatas meninggalkan sekolah<sup>5</sup>, serta masalah kesehatan pada anak.

Disisi lain, berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor keluarga memainkan peran penting dalam keputusan anak melanjutkan atau meninggalkan sekolah. Faktor keluarga yang paling umum seperti kesulitan sosio ekonomi keluarga (kemiskinan)<sup>6</sup>, rendahnya perhatian dan dukungan orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, kurangnya kesadaran orang tua akan

---

<sup>4</sup> Dedimus Berangka, ‘Implikasi Pendidikan Anak Dalam Keluarga Terhadap Angka Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Maro Distrik Merauke’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 10.2 (2022), 44–59 <<https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.62>>.

<sup>5</sup> Wildatu Syarofah, ‘Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Dusun Krajan Desa Sembulung Kecamatan Cluring’, *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 2.2 (2021), 208–16 <<https://doi.org/10.46838/jbic.v2i2.108>>.

<sup>6</sup> Herri Gunawan, ‘Faktor Penyebab Dan Dampak Anak Putus Sekolah( Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat SLTP Dan SLTA Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat’ , 2019.

pentingnya pendidikan<sup>7</sup>, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tidak utuh<sup>8</sup>. Selain itu, faktor yang bersumber dari lingkungan dan sistem sekolah itu sendiri juga bepengaruh terhadap keputusan anak meninggalkan bangku pendidikan lebih awal, yang meliputi kualitas pengajaran<sup>9</sup>, lingkungan sosial di sekolah<sup>10</sup>, kebijakan dan aturan sekolah<sup>11</sup>, fasilitas pendidikan, serta kesiapan sekolah menangani kebutuhan siswa<sup>12</sup>. Faktor lingkungan sosial juga turut berkontribusi seperti pengaruh teman sebaya (peer group), budaya setempat atau norma masyarakat, serta dukungan komunitas terhadap Pendidikan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia remaja berpotensi terpengaruh teman sebaya lebih tinggi sehingga ketika seorang anak bergaul dengan teman yang sudah dropout atau tidak mementingkan pendidikan kemungkinan besar ia akan ikut arus, seperti halnya lingkungan tempat tinggal anak<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup> Collins C Ngwakwe, ‘A Review of Causes of School Dropouts in Brics Countries: A South African Case’, in *Corporate Ownership & Control*, no. 1 (2014), XII.

<sup>8</sup> Ahmad Yaneri, Vivi Suviani, and Nike Vonika, ‘Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin Di Kampung Lio Kota Depok)’, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayosos)*, 4.1 (2022), 76–89 <<https://doi.org/10.31595/lindayosos.v4i1.554>>.

<sup>9</sup> Collins C Ngwakwe, *A Review of Causes of School Dropouts in Brics Countries: A Sout African Case*, *Corporate Ownership & Control*, 2014, XII.

<sup>10</sup> Jonathan Jacob Doll, Zohreh Eslami, and Lynne Walters, ‘Understanding Why Students Drop out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed or Pulled, Or Do They Fall out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative Studies’, *SAGE Open*, 3.4 (2013), doi:10.1177/2158244013503834.

<sup>11</sup> Doll, Eslami, and Walters, ‘Understanding Why Students Drop out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed or Pulled, Or Do They Fall out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative Studies’.

<sup>12</sup> Elmi Arsita and Muhammad Ilyas, ‘Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)’, 9.1 (2022), pp. 43–48 <<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>>.

<sup>13</sup> Tabata Contreras-Villalobos, Enrique Baleriola Escudero, and Verónica López Leiva, ‘Digging and Building: How Transformative Mixed-Methods Research Contributes to Explaining and

Secara nasional, APS masih menjadi tantangan serius terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Ketidakmerataan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan mengakibatkan kesenjangan partisipasi sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Kondisi ini menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat permasalahan APS menunjukkan adalanya peningkatan, di samping itu masih terdapat anak usia sekolah yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan dan rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten Dharmasraya hanya sampai jenjang sekolah menengah atas bahkan tidak sedikit masyarakat di daerah ini yang masih mengalami buta huruf.

**Tabel 1. 1 Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya dalam Rentang Waktu 2019-2020**

Jenis kelamin dan Kelompok usia	Partisipasi Sekolah 7-24 tahun					
	Tidak/Belum Pernah Sekolah		Masih Sekolah		Tidak Sekolah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
7-12 (L+P)	0,30	0,73	99,45	99,27	0,25	0,00

13-15 (L+P)	0,00	0,00	96,05	95,85	3,95	4,15
16-18 (L+P)	1,18	2,57	70,87	70,87	27,97	26,56
19-24 (L+P)	0,00	0,00	12,72	14,20	87,28	85,80

Sumber: *Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya*

Berdasarkan data Statistik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan anak putus sekolah setiap tahunnya dan masih terdapat anak usia sekolah belum mengenyam pendidikan sama sekali dan data tersebut juga menunjukkan bahwa anak muda kabupaten Dharmasraya rata-rata hanya melanjutkan pendidikan paling tinggi adalah Sekolah Menengah Akhir (SLTA)<sup>14</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Dukcapil jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 tercatat 227.053 orang, jumlah anak usia 15 keatas yang mengalami melek huruf sebanyak 76.831 sedangkan jumlah anak usia 15 tahun keatas yakni sebanyak 78.113, dari jumlah tersebut setidaknya terdapat sebanyak 1282 orang yang buta huruf. Data ini menunjukkan bahwa di era teknologi yang serba canggih saat ini masih saja terdapat masyarakat yang buta huruf. Hal ini disebabkan oleh faktor salah satunya rendahnya kesadaran masyarakat Dharmasraya terhadap pentingnya pendidikan, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi akar permasalahan peningkatan perkawinan usia anak.

---

<sup>14</sup> Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya, ‘Data Anak Putus Sekolah’, *Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya*, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa masalah pendidikan di kabupaten Dharmasraya sangat mengkhawatirkan<sup>15</sup>.

Jika ditarik lebih khusus, Kecamatan Sembilan Koto merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di kabupaten Dharmasraya dengan tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah dan tingkat APS yang cukup tinggi dan sangat minim masyarakat yang melanjutkan pendidikan tinggi. Kondisi tersebut semakin menegaskan rendahnya kesadaran pendidikan di kecamatan ini. Berikut data partisipasi pendidikan masyarakat kecamatan Sembilan Koto per 31 Desember 2024.

**Tabel 1. 2 Partisipan Sekolah Kecamatan Sembilan Koto per 31 Desember 2024**

<b>Nagari/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Partisipasi Sekolah 7-24 tahun</b>							
		Tidak atau Belum pernah Sekolah	<b>Belum tamat SD</b>	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1, D2, dan D3	S1	S2
Banai	3.384	839	441	1.127	454	365	28	129	1
Koto Ampek Nan Dibawuh	3.053	815	430	896	432	357	35	87	1
Lubuk Karak	1.346	352	180	483	142	132	13	43	1
Silago	2.063	469	238	488	387	332	42	105	2

Sumber: Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Berdasarkan data dari Dukcapil per 31 desember 2024 hanya 369 penduduk mengenyam Pendidikan hingga perguruan tinggi, 364 lulusan S1 dan 5 orang berpendidikan S2. Sementara sebanyak 2.994 dari total jumlah penduduk kecamatan Sembilan Koto rata-rata hanya tamat Sekolah dasar (SD). Jika dilihat

<sup>15</sup> Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya.

data pendidikan penduduk per nagari/kelurahan maka dapat kita simpulkan bahwa penduduk setiap kelurahan rata-rata hanya mengenyam pendidikan hingga SD dan penduduk yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi sangat rendah, di kelurahan Banai misalnya hanya 129 orang berpendidikan S1 dari total jumlah penduduk 3.384 jiwa dan hanya 1 orang yang kuliah hingga S2, dan tidak jauh berbeda dengan 3 kelurahan lain di Kecamatan Sembilan Koto (lihat table 2).

Rendahnya partisipasi pendidikan di Kecamatan Sembilan Koto tidak terlepas dari persepsi negatif sebagian masyarakat yang menganggap sekolah tidak menjamin kesuksesan hidup. Banyak orang tua lebih memilih anaknya bekerja, terutama di sektor penambangan emas, dibanding melanjutkan pendidikan formal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di beberapa kelurahan di Kecamatan Sembilan Koto diperoleh informasi bahwa masih terdapat persepsi negatif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin kesuksesan hidup dan justru dianggap sebagai pemborosan biaya. Mereka menilai bahwa tanpa pendidikan tinggi pun seseorang tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Persepsi ini berkorelasi dengan meningkatnya angka perkawinan usia anak<sup>16</sup>, khususnya bagi anak perempuan yang hanya lulusan sekolah dasar atau menengah pertama. Perkawinan anak tidak hanya menghambat keberlanjutan pendidikan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga rendahnya kualitas generasi penerus<sup>17</sup>. Lebih jauh putus sekolah memiliki dampak yang sangat signifikan baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, putus sekolah umumnya merugikan masa depan mereka. Tanpa ijazah atau keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, anak yang putus sekolah cenderung menghadapi keterbatasan dalam pasar kerja. Mereka kesulitan memperoleh pekerjaan layak, sehingga berisiko menjadi pengangguran atau terjebak dalam pekerjaan berupah rendah<sup>18</sup>.

Statistik di banyak negara menunjukkan perbedaan pendapatan mencolok antara lulusan sekolah dan dropout. Sebagai contoh, rata-rata lulusan SMA di Amerika Serikat berpenghasilan sekitar \$9.000 lebih tinggi per tahun dibandingkan yang tidak lulus<sup>19</sup>. Artinya, putus sekolah berimplikasi pada kerugian pendapatan seumur hidup<sup>20</sup>. Bahkan sebuah laporan menyebut setiap

---

<sup>16</sup> Kassie Wubet Ebabu and others, ‘Spatially-Informed Insights into Early Marriage and School Dropout: An Advanced Bivariate Binary Multilevel Model for Understanding Ethiopia’s Context’, *Heliyon*, 10.11 (2024), doi:10.1016/j.heliyon.2024.e32005.

<sup>17</sup> Mutia Febriana and Mohammad Ridwan Rangkuti, ‘Koordinasi Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Deli Serdang’, *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14.2 (2023), 173–87 <<https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.407>>.

<sup>18</sup> Rahmadania Hasmidah, ‘Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya’, 2021.

<sup>19</sup><https://dropoutprevention.org/>, ‘Economic Impacts of Dropouts’, *National Dropout Prevention Center*, 2022.

<sup>20</sup> Herri Gunawan. Herri Gunawan. Faktor Penyebab dan Dampak anak putus sekolah,....

individu dropout dapat mengurangi pemasukan ekonomi hingga ratusan ribu dolar sepanjang hayatnya. Dengan penghasilan yang lebih rendah, para dropout berisiko lebih tinggi mengalami kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya di kemudian hari<sup>21</sup>.

Selain aspek ekonomi, pengaruh psikologis dan sosial pada individu juga signifikan. Remaja yang putus sekolah kerap mengalami rasa minder atau penyesalan karena tingkat pendidikannya tertinggal. Mereka mungkin kurang percaya diri bersaing dengan teman sebayanya yang melanjutkan sekolah. Dalam jangka panjang, kurangnya pendidikan dapat membatasi wawasan dan keterampilan hidup individu, sehingga mereka sulit berintegrasi dalam lingkungan sosial yang menuntut kemampuan literasi atau pengetahuan tertentu<sup>22</sup>.

Lebih mengkhawatirkan lagi, putus sekolah bisa menjebak remaja dalam perilaku berisiko. Banyak penelitian menemukan korelasi antara dropout dengan kenakalan remaja dan kriminalitas. Tanpa aktivitas sekolah, remaja lebih banyak waktu luang dan mungkin bergaul di lingkungan negatif<sup>23</sup>. Na et al. menemukan bahwa remaja pelaku tindak pidana yang putus sekolah memiliki kemungkinan

<sup>21</sup> Arif Miftuhin, ‘Identifikasi Penyebab Enam Anak Putus Sekolah Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali’, 2017.

<sup>22</sup><https://kuliahditurki.org/>, ‘Apa Saja Dampak Bagi Anak Yang Putus Sekolah?’, *Kuliah Di Turki: Informasi Menarik Seputar Kuliah di Turki*, January 2025.

<sup>23</sup> Sung Man Bae, ‘Long-Term Effect of Adverse Childhood Experiences, School Disengagement, and Reasons for Leaving School on Delinquency in Adolescents Who Dropout’, *Frontiers in Psychology*, 11 (2020), doi:10.3389/fpsyg.2020.02096.

ditangkap kembali yang lebih tinggi dibanding yang tetap bersekolah<sup>24</sup>. Studi lain juga mengindikasikan dropout meningkatkan peluang remaja terlibat tindak kriminal atau penyalahgunaan narkoba, meskipun seringkali hal ini dipengaruhi pula oleh faktor latar belakang seperti kemiskinan dan pengalaman buruk masa kecil.

Menariknya, ada temuan bahwa alasan seorang remaja putus sekolah turut memengaruhi keterlibatannya dalam kenakalan. Remaja yang keluar karena faktor pribadi, seperti memilih bekerja atau alasan keluarga, melaporkan tingkat kenakalan lebih rendah daripada yang keluar karena masalah akademik atau disiplin di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dropout akibat kegagalan di sekolah berpotensi menimbulkan frustrasi lebih besar yang bermuara pada perilaku negatif.

Konsekuensi putus sekolah tidak berhenti pada individu; secara agregat hal ini membebani dan memengaruhi pembangunan masyarakat maupun negara. Angka putus sekolah yang tinggi berarti banyak potensi SDM yang tidak tergarap optimal<sup>25</sup>, sehingga kualitas rata-rata tenaga kerja menurun. Akibatnya, produktivitas ekonomi masyarakat bisa terhambat.

Pada tingkat mikro, hal ini berarti ada bagian populasi muda yang tidak terampil dan tidak produktif secara optimal; pada tingkat makro, apabila banyak

<sup>24</sup> Chongmin Na, ‘The Consequences of School Dropout among Serious Adolescent Offenders: More Offending? More Arrest? Both?’, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 54.1 (2017), pp. 78–110, doi:10.1177/0022427816664118.

<sup>25</sup> Diego González-Rodríguez, María José Vieira, and Javier Vidal, ‘Factors That Influence Early School Leaving: A Comprehensive Model’, *Educational Research* (Routledge, 3 April 2019), pp. 214–30, doi:10.1080/00131881.2019.1596034.

pemuda putus sekolah, indikator kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menurun. Studi menunjukkan negara atau daerah dengan angka putus sekolah tinggi akan mengalami penurunan kualitas hidup dan kapasitas inovasi. Hal ini karena kurangnya tenaga kerja terdidik dapat mengurangi daya saing ekonomi dan meningkatkan beban sosial, misalnya meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan<sup>26</sup>.

Tingginya angka dropout juga berkorelasi dengan peningkatan pengangguran di masyarakat<sup>27</sup>. Dengan kualifikasi rendah, para dropout lebih sulit terserap lapangan kerja formal, yang pada gilirannya menambah angka pengangguran terbuka. Pengangguran yang tinggi dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan struktural dan ketimpangan pendapatan. Masyarakat dengan banyak pemuda putus sekolah mungkin menghadapi lingkarannya setan kemiskinan, di mana keluarga miskin cenderung melahirkan generasi putus sekolah yang kemudian tetap miskin. Hal ini menjadi tantangan bagi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu negara.

Dari sisi sosial, konsentrasi remaja putus sekolah juga bisa meningkatkan angka kriminalitas dan masalah ketertiban. Kurangnya pendidikan sering diiringi terbatasnya peluang ekonomi, sehingga sebagian remaja dapat terlibat aktivitas ilegal untuk bertahan hidup. Data Thorstensen yang dikutip National Dropout

<sup>26</sup> Daniel González-González and others, ‘The Impact of Academic Dropout at the University of Granada and Proposals for Prevention<sup>12</sup>’, *Frontiers in Education*, 8 (2023), doi:10.3389/feduc.2023.1110491.

<sup>27</sup> Rahmadania Hasmidah, ‘Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya’, 2021.

Prevention Center memperkirakan besarnya biaya kejahatan dan kesejahteraan publik akibat banyaknya pria muda tidak berpendidikan (usia 25-34 yang tidak tamat sekolah) mencapai puluhan miliar dolar. Artinya, masyarakat menanggung beban biaya penanggulangan kriminalitas dan bantuan sosial yang lebih besar akibat populasi putus sekolah<sup>28</sup>.

Lebih jauh, secara kultural, maraknya anak putus sekolah dapat melemahkan kultur pendidikan dalam masyarakat. Jika dalam suatu komunitas angka putus sekolah tinggi, nilai-nilai pendidikan cenderung merosot sehingga generasi berikutnya pun menganggap wajar untuk tidak menamatkan sekolah. Ini bisa menghambat terciptanya masyarakat berpengetahuan (knowledge society) yang diperlukan di era ekonomi modern. Dengan SDM berpendidikan rendah, akan kekurangan pula figur pemimpin lokal, inovator, maupun profesional terampil di komunitas tersebut<sup>29</sup>.

Permasalahan APS yang kompleks tersebut menuntut adanya peran strategis dari **pemerintah daerah**. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pendidikan, termasuk kewajiban mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan

---

<sup>28</sup> <https://dropoutprevention.org/>, ‘Economic Impacts of Dropouts’.

<sup>29</sup> <https://www.kompasiana.com/>, ‘Dampak Negatif Dan Konsekuensi Jangka Panjang Dari Tingginya Angka Putus Sekolah’, *Https://Www.Kompasiana.Com/*, May 2023.

pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh perhatian, kebijakan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah<sup>30</sup>.

Salah satu pendekatan yang paling potensial dalam upaya mengatasi masalah APS adalah melalui penyelarasan pendidikan dengan nilai-nilai agama Islam ke dalam system pendidikan. Hal ini relevan mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Sembilan Koto beragama Islam. Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga penguatan nilai religius, diyakini dapat memberikan motivasi spiritual dan moral kepada anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan. Zakiah Daradjat menegaskan bahwa semangat dan motivasi belajar anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan yang berlandaskan nilai, di mana guru memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian<sup>31</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perhatian Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan dan Nilai-nilai Agama Islam di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Ahmad Fauzi, Andi Gau Kadir, and Andi Murfhi, ‘Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.8 (2012), 85–96.

<sup>31</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 17th ed. (Jakarta, PT BULAN BINTANG, 2010), hlm. 71

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di Kecamatan Sembilan Koto?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan Pendidikan di Kecamatan Sembilan Koto?
3. Bagaimana nilai-nilai agama Islam dapat diterapkan dalam Pendidikan di kecamatan Sembilan Koto untuk mengurangi angka putus sekolah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diawal, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di kecamatan Sembilan Koto;
2. Mengetahui Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemerataan Pendidikan;
3. Menggali penerapan nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan di kecamatan Sembilan Koto sebagai upaya pencegahan putus sekolah.

Adapun manfaat penelitian tesis ini sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritik

Melalui analisis yang mendalam terhadap dinamika kebijakan publik di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks pembangunan lokal, penelitian ini

dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan pendidikan berperan dalam memengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan atau perdesaan. Selain itu, dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi pendidikan dan tingkat putus sekolah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori sosiologi pendidikan yang ada, melengkapi pemahaman tentang dinamika sosial di dalam dan di sekitar institusi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan praktis bagi pengambil kebijakan dan masyarakat setempat, tetapi juga memperkaya literatur akademis dalam berbagai bidang yang relevan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Temuan penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemerintah dalam mengatasi masalah putus sekolah.

### b. Bagi Masyarakat Setempat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mengatasi masalah putus

sekolah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program-program intervensi yang lebih efektif.

c. Bagi Pendidik dan Praktisi Pendidikan

Temuan penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal.

d. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti dan akademisi dalam memperdalam pemahaman tentang berbagai aspek kebijakan pendidikan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Hal ini dapat membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dan kontribusi terhadap literatur akademis.

#### D. Kajian Pustaka

1. Arif Miftuhin (2017) yang berjudul “Identifikasi Penyebab Enam Anak Putus Sekolah di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali” menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *snowball sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, serta uji triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metodologi penelitian. Namun terdapat perbedaan pada ruang lingkup, tujuan dan sudut

pandang penelitian. Hasil penelitian Arif menunjukkan bahwa penyebab utama anak putus sekolah dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu rendahnya motivasi belajar anak. Anak-anak lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan formal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang mayoritas hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) turut berpengaruh terhadap minimnya motivasi dan dukungan orang tua dalam mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah. Faktor lain yang ditemukan adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas.

2. M. Syiful (2019) yang berjudul “kebijakan Pemerintah Daera kota Yogyakarta dalam Penanganan Anak Jalanan (Putus Sekolah) Perspektif Maslahah Mursalah”. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah daerah kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan tidak bertentangan dengan *Maslahah Mursalah*. Artinya kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan dan kemudaratan. Penelitian ini adalah penelitian Library Reaset dengan metode analisis deskriptif.
3. Purnomo Adi (2009) yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Anak Usia Sekolah Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Studi kasus di Desa Pesantren Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak putus sekolah dipengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua yang tidak dapat mendukung pendidikan anak mereka, selain itu juga orang tua beranggapan bahwa sekolah tidaklah begitu penting. Sehingga

menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan. Faktor aksebilitas juga menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, karena jarak sekolah dengan rumah yang cukup memberikan rintangan, fasilitas jalan yang tidak baik dan tidak adanya transportasi yang dapat mengantarkan anak-anak untuk pergi sekolah.

4. Yorizal Tri M (2021) dengan judul “Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah di Kampung Nelayan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah dikarenakan adanya faktor dari dalam diri anak dan juga dari luar diri. Sebagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kelurahan untuk mengembangkan SDM anak putus sekolah tersebut yakni dengan menerapkan pendidikan kesetaraan, membuat dialog komunitas, mendirikan rumah zakat serta melaksanakan kegiatan keliling kampung. Dengan demikian, bahwa dapat ditarik kesimpulan permasalahan mengenai anak putus sekolah telah berhasil diminimalisir melalui strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan Belawan.
5. Wicaksono (2021) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar di Provinsi Papua” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pengentasan anak putus sekolah tingkat pendidikan dasar di Provinsi Papua meliputi tiga area kebijakan, yaitu: (1) pembangunan dan penguatan ketersediaan layanan pendidikan meliputi: pembangunan sekolah berpola asrama dan rehabilitasi

ruang kelas. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan ini yaitu tersedianya SOP yang jelas, sedangkan untuk faktor penghambat meliputi: kurangnya diskusi dan bimbingan, aktor yang tidak konsisten, SOP yang rumit, ketidaksesuaian sumber daya dengan peraturan, penyelewengan dana oleh Pemerintah Daerah, serta kurangnya pengawasan Pemerintah Pusat. Untuk area kebijakan (2) menekan angka kemangkiran guru melalui: pemberian tunjangan guru daerah khusus, dimana terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaanya yang meliputi: adanya diskusi dan bimbingan teknis, tersedianya sumber daya informasi, adanya dukungan aktor, aktor yang responsif, serta SOP yang jelas. Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain: kurangnya koordinasi, kurangnya SDM yang berkompeten, dan kurangnya fasilitas pendukung. Adapun area kebijakan ke (3) yaitu pemberian bantuan biaya melalui: BOS, dan PIP. Adapun faktor-faktor yang mendukung pada area kebijakan ini antara lain: adanya sosialisasi dan bimbingan teknis, aktor yang responsif, dukungan aktor, serta SOP yang jelas. Sedangkan faktor yang menghambat meliputi: SOP yang rumit, kurangnya koordinasi dan sosialisasi, kurangnya SDM yang berkompeten, serta kurangnya fasilitas pendukung.

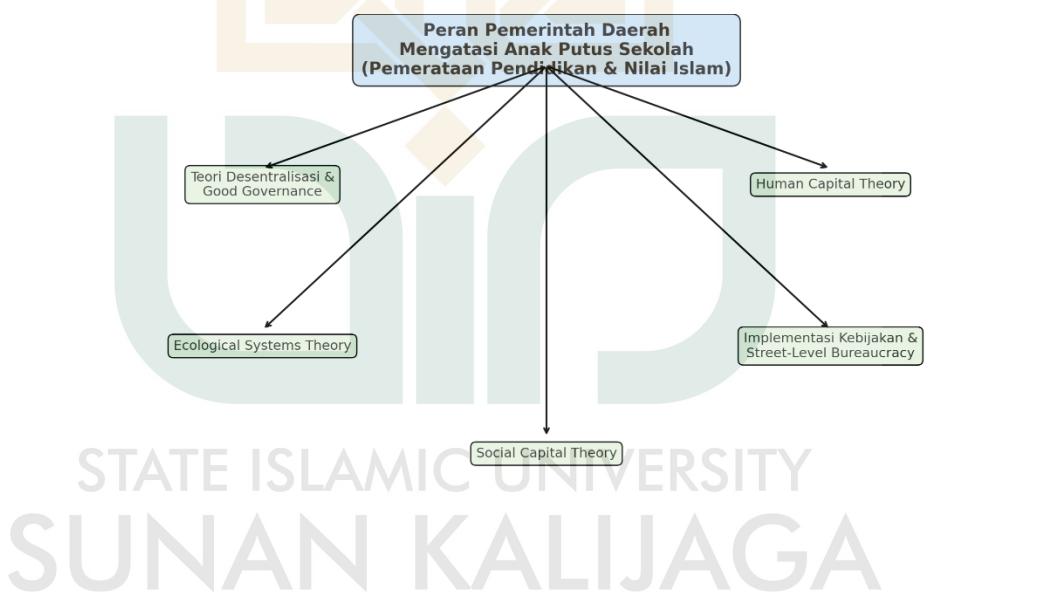
Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji anak putus sekolah dilihat pada kebijakan pemerintah, dan anak putus sekolah dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah. Dari beberapa penelitian

tersebut masih ada kekosongan dimana anak putus sekolah ini tidak dilihat dari bagaimana internalisasi nilai-nilai Pendidikan Islam dikelas atau sekolah formal.

## E. Kerangka Teori

### 1. Peran Pemerintah Daerah

Penelitian ini bertumpu pada beberapa teori besar yang saling melengkapi untuk memahami peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah demi pemerataan pendidikan serta penguatan nilai-nilai agama Islam di Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya.



Teori desentralisasi dan good local governance menjadi basis utama untuk menelaah kewenangan serta tata kelola pemerintah daerah. Desentralisasi memungkinkan daerah memiliki keleluasaan merumuskan

kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal<sup>32</sup>. Nugroho mengutip pendapat Chau bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah pendeklasian kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Model desentralisasi yang dianut adalah *devolusi*, di mana tanggung jawab manajemen dan pembiayaan pendidikan dasar dibebankan pada pemerintah kabupaten/kota<sup>33</sup>. Dengan demikian, sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam studi Zarmaili, keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah<sup>34</sup>. Perhatian dan komitmen kepala daerah dan jajarannya menjadi kunci agar kebijakan pendidikan yang telah dilimpahkan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Secara teoretis, desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah lokal untuk lebih akuntabel dan inovatif dalam menyediakan layanan pendidikan. Teori ekonomi publik klasik menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan penyesuaian layanan dengan preferensi masyarakat setempat

<sup>32</sup> Maharina Desimaria and Amy Yayuk Sri Rahayu, ‘Reconnoitring Decentralization Policy of Education in Indonesia’, *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14.1 (2022), pp. 1019–28, doi:10.35445/alishlah.v14i1.1892.

<sup>33</sup> Nurhatati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 4-5

<sup>34</sup> Zarmaili, ‘Peran Pemerintah Daerah Terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi’, *Jurnal Bina Praja*, 5 (2013), pp. 13–26.

sehingga alokasi sumber daya lebih efisien, menurut Oates, dalam Muttaqin<sup>35</sup>. Selain itu, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, para pemimpin lokal memiliki insentif untuk memenuhi aspirasi warga di bidang pendidikan demi mempertahankan legitimasi politiknya. Oleh karena itu, Nugroho menjelaskan peran pemerintah daerah terhadap isu pendidikan bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan prasyarat mencapai tujuan kebijakan pendidikan itu sendiri.

Prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi alokasi sumber daya menekankan bahwa keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh adanya regulasi, melainkan juga kualitas tata kelola dalam implementasinya. Oleh karena itu, analisis kebijakan daerah, struktur anggaran (APBD), dan kapasitas institusional pemerintah daerah menjadi variabel kunci yang menentukan outcome pendidikan.<sup>36</sup>.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan good governance pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam mengelola urusan daerahnya sendiri termasuk mengelola urusan pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014. UU ini menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah menjadi

---

<sup>35</sup> Muttaqin and others, ‘The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia’.

<sup>36</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung, Alfabetika, 2006), hal. 1-2

tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota, termasuk kewajiban alokasi anggaran minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan Pendidikan<sup>37</sup>.

Pendidikan memiliki peran vital karena berdampak langsung pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa maka pemerintah harus memastikan mutu dan pelayanan pendidikan sesuai standar sehingga terselenggara Pendidikan yang berkualitas.

Human Capital Theory memberikan justifikasi normatif sekaligus ekonomis atas pentingnya investasi pendidikan<sup>38</sup>. Menurut teori ini pendidikan dipandang sebagai sarana peningkatan keterampilan dan produktivitas individu yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang<sup>39</sup>. Maka investasi di sektor pendidikan membawa dampak jangka panjang yang signifikan secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi teori pembangunan, pendidikan dianggap sebagai modal manusia (*human capital*) yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> BudiWinarto, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Press, 2008)

<sup>38</sup> G.S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (Chicago Amerika Serikat, 1966). hlm. 15

<sup>39</sup> Theodore W. Schultz, *InvestmentHumanCapital* (1961). Hlm. 12

<sup>40</sup> Widiastuti, ‘Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievement, and Future Direction’.

Syam et al. dalam Nugroho menyatakan bahwa investasi pendidikan yang difasilitasi kebijakan pemerintah memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi<sup>41</sup>. Daerah yang penduduknya berpendidikan cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan kemampuan berinovasi lebih tinggi. Dengan demikian, perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan adalah investasi strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakatnya.

## 2. Anak Putus Sekolah (APS)

Istilah anak putus sekolah (APS) merujuk pada anak usia sekolah yang berhenti atau keluar dari pendidikan formal sebelum menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Sweeting & Muchlisoh mendefinisikan putus sekolah sebagai siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, Gunawan menjelaskan putus sekolah sebagai suatu predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Sementara itu, kemdikbud mendefinisikan Anak Putus Sekolah (APS) sebagai anak usia 6 hingga 21 tahun yang sudah tidak bersekolah, baik yang tidak pernah bersekolah sama sekali atau telah berhenti karena alasan

---

<sup>41</sup> Ilham and others, *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia the Government's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia*, V.

ekonomi, sosial, Kesehatan atau faktor lain. Sejalan dengan penelitian Haveman & Wolfe, dalam penelitiannya tentang menyatakan bahwa anak putus sekolah adalah mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka pada usia yang seharusnya dan keluar dari sistem pendidikan sebelum mencapai Tingkat pendidikan dasar atau menengah<sup>42</sup>.

Anak putus sekolah mencakup anak usia di bawah 18 tahun sesuai batasan umur anak pada UU No 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 2008 yang berhenti sekolah sebelum lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Ecological Systems Theory dari Bronfenbrenner menempatkan anak dalam konteks lingkungan yang berlapis. Keputusan seorang anak untuk berhenti atau melanjutkan sekolah dipengaruhi oleh interaksi antar-level seperti, keluarga dan sekolah (mikrosistem), hubungan antar-institusi seperti koordinasi antara sekolah dan dinas pendidikan (mesosistem), kebijakan dan kondisi ekonomi yang berada di luar ruang pribadi keluarga (eksosistem), serta nilai budaya dan agama yang membentuk norma sosial (makrosistem). Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan anak bukan hanya lingkungan tempat anak berada tapi lebih jauh kebijakan juga sangat berpengaruh dalam menentukan keberlangsungan Pendidikan anak.

---

<sup>42</sup> Robert Haveman and Barbara Wolfe, *The Determinants of Children's Attainments: A Review of Methods and Findings*, 33 (1995), pp. 1829–78.

### 3. Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (policy term) digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang actor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu<sup>43</sup>. Lebih jauh, Robert Eyestone, menjelaskan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas R Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Selain itu kebijakan publik menurut Richard Rose adalah sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka.

Lebih dalam, Friedrich dalam Agustino mendefinisikan Kebijakan public sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud<sup>44</sup>. Sehubungan dengan kebijakan Anderson dalam Budi Winarto mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

---

<sup>43</sup> M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, 1st edn (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015). Hal 37-40

<sup>44</sup> Agustinus Subarsono, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, ed. by Agustinus Subarsono, 1st edn (GAVA MEDIA, 2016).

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan<sup>45</sup>. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Dalam konteks kebijakan publik, peran pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bentuk fokus dan prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap isu-isu sosial tertentu, khususnya pendidikan<sup>46</sup>. Pemerintah daerah dipandang sebagai agen perubahan yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah adalah fungsi-fungsi utama yang diemban dalam proses pembangunan dan pemberdayaan komunitas. Dalam kerangka pembangunan sosial yang inklusif, peran pemerintah terutama di tingkat lokal memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola, mengarahkan, dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan kolektif<sup>47</sup>.

#### **4. Pemerataan Pendidikan**

Menurut Rawlsian theory of justice (John Rawls), pemerataan pendidikan adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial. Ini

---

<sup>45</sup> BudiWinarto, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Press, 2008) hlm. 18

<sup>46</sup> Febi Wulandari and others, *Evaluatin of the Policy of the Five Flagship Programs of Regens Joko Sutopo in Wonogiri Regency in 2016-2020* <<https://www.fisip.undip.ac.id>>.

<sup>47</sup> Wan Sunida, ‘Peran Aktor Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Meranti’, 3 (2023).

mencakup distribusi sumber daya pendidikan yang adil, seperti guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan terbelakang. Pemerataan pendidikan juga melibatkan penyediaan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengakses pendidikan yang sama berkualitasnya<sup>48</sup>.

a. Prinsip Kebebasan

Menurut Rawls, keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap orang memiliki hak dasar yang sama dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks pendidikan, prinsip kebebasan berarti setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, gender, etnis, status sosial, maupun ekonomi. Kebebasan dalam mengakses pendidikan harus menjadi pondasi utama agar tidak ada kelompok yang termarjinalkan atau terpinggirkan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kebebasan warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai hak dasar, yang merupakan pintu gerbang bagi peningkatan kualitas hidup di masa depan<sup>49</sup>.

b. Prinsip Perbedaan

Dalam teori ini Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima sepanjang hal tersebut memberikan

---

<sup>48</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (America, 1971). hlm.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 52-65

keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok anak yang berisiko putus sekolah, terutama di daerah miskin, terpencil, atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Program afirmatif seperti beasiswa bagi siswa miskin, bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sekolah baru, maupun pengadaan tenaga pengajar tambahan adalah wujud nyata penerapan prinsip perbedaan dalam pendidikan. Dengan demikian, meskipun ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara kota dan desa, kebijakan harus diarahkan agar ketimpangan tersebut justru meningkatkan peluang dan kualitas pendidikan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan<sup>50</sup>.

c. Kesempatan yang Sama

Rawls juga menegaskan pentingnya prinsip equal opportunity atau kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama dalam pendidikan menghendaki bahwa setiap anak harus memiliki peluang setara untuk meraih prestasi akademik tanpa dipengaruhi oleh kondisi keluarga, ekonomi, atau lingkungan sosial. Artinya, sistem pendidikan harus dirancang untuk meminimalkan hambatan struktural, seperti dengan menyediakan sekolah gratis, fasilitas transportasi bagi siswa di daerah terpencil, serta akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Dengan adanya prinsip ini, pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 75-83

bagi kelompok tertentu, melainkan hak bersama yang terbuka secara adil untuk semua lapisan masyarakat<sup>51</sup>.

d. Implikasi bagi Pemerintah Daerah

Dalam kerangka Rawlsian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pemerataan pendidikan terwujud secara substantif, bukan hanya formal. Hal ini berarti pemerintah daerah tidak cukup hanya mendirikan sekolah di setiap wilayah, tetapi juga harus menjamin bahwa kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut relatif setara. Alokasi anggaran pendidikan daerah perlu lebih berpihak kepada sekolah-sekolah di wilayah tertinggal yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan sosial seperti program gizi untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dengan demikian, pemerataan pendidikan dalam perspektif Rawls bukan hanya soal kesamaan perlakuan, tetapi juga tentang pemberian perlakuan adil sesuai kebutuhan agar semua anak dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang memadai.

Namun demikian, tantangan besar masih terlihat dalam hal pemerataan dan kualitas pendidikan antar daerah. Desentralisasi ternyata juga diiringi variasi kinerja yang tinggi, beberapa daerah maju pesat, sementara daerah lain tertinggal. Muttaqin et al. mencatat bahwa setelah

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 63-73

lebih dari satu dekade otonomi, kesenjangan antardaerah dalam capaian pendidikan justru meningkat, di mana wilayah pedesaan dan kabupaten kurang berkembang cenderung tertinggal dalam peningkatan rata-rata lama sekolah<sup>52</sup>. Penelitian lain mengungkap disparitas kualitas pendidikan antara daerah urban dan rural yang masih mencolok, disebabkan distribusi sumber daya yang belum merata dalam Sukmayadi & Yahya. Hal ini diperkuat oleh temuan Chang et al. bahwa tata kelola terdesentralisasi kerap menimbulkan inkonsistensi alokasi sumber daya dan output pendidikan di berbagai provinsi<sup>53</sup>. Dengan kata lain, perhatian pemerintah daerah yang tidak merata dapat berujung pada kesenjangan layanan pendidikan.

Beberapa permasalahan spesifik yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di daerah antara lain seperti penyebaran guru yang tidak proporsional, sarana-prasarana yang timpang, dan kapasitas manajemen yang berbeda-beda. Studi kasus di Kabupaten Batanghari menunjukkan peran pemda setempat masih lemah, tercermin dari distribusi guru dan bantuan dana pendidikan yang belum merata, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi Masyarakat dalam

---

<sup>52</sup> Tatang Muttaqin and others, ‘The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia’, in *Decentralization and Governance in Indonesia* (Springer International Publishing, 2015), pp. 79–103, doi:10.1007/978-3-319-22434-3\_4.

<sup>53</sup> Mae Chu Chang and others, *Teacher Reform in Indonesia The Role of Politics and Evidence in Policy Making Human Development* (Washington, 2014), doi:10.1596/978-0-8213-9829-6.

pengelolaan pendidikan<sup>54</sup>. Kondisi serupa banyak dijumpai di daerah terpencil atau tertinggal. Pemerintah daerah menghadapi kendala geografis dan fiskal dalam memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan, sehingga tanpa intervensi dan perhatian ekstra, mutu pendidikan di daerah tersebut dapat tertinggal jauh dibanding daerah maju.

Oleh karena itu, peran strategis pemerintah daerah mencakup memastikan akses sekaligus kualitas. Tidak cukup hanya meningkatkan anggaran pendidikan, tetapi harus disertai upaya distribusi yang adil dan penggunaan yang efisien di seluruh wilayah. Penelitian Ilham et al. menekankan bahwa alokasi anggaran yang memadai adalah prasyarat penting peningkatan mutu, namun perlu dibarengi pemerataan dan pengawasan agar dana benar-benar terserap untuk perbaikan kualitas. Selain pendanaan, pemda perlu menetapkan regulasi daerah yang mendukung standar pendidikan, melakukan pembaruan kurikulum sesuai konteks lokal, menyediakan program pelatihan guru berkelanjutan, dan memperkuat sistem supervisi sekolah<sup>55</sup>. Dengan perhatian menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, pemerintah daerah dapat menjaga agar

---

<sup>54</sup> Peran Pemerintah and others, *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Role of Goverment Education Sector in the District Batanghari Jambi Province*.

<sup>55</sup> Dodi Ilham and others, *Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia the Government's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia*, 2023, v.

layanan pendidikan di wilayahnya tidak hanya terjangkau, tetapi juga bermutu tinggi dan berkeadilan.

## **5. Konsep nilai-nilai agama Islam dalam Pendidikan Formal**

Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh<sup>56</sup>. Oleh karena sebagai dasar tata nilai merupakan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>57</sup>, maka pemahaman dan pengalamannya dengan tepat dan benar diperlukan sebagai fondasi terbentuknya kepribadian beragama yang kokoh<sup>58</sup>.

### **a. Nilai-Nilai Agama Islam**

Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Sidi Gazalba, nilai bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, dan bukan fakta yang dapat dibuktikan secara empiris. Nilai bukan semata persoalan benar dan salah,

---

<sup>56</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, 10th ed. (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012). hlm. 86-87

<sup>57</sup> Wildan Saleh Siregar, ‘Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 2 Sibolangit’, *Manajia: Journal of Education and Management*, 1.2 (2023), p. 87, doi:10.61166/manajiav1i2.13.

<sup>58</sup> Novi Puspitasari and others, *Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religious Peserta Didik*.

melainkan merupakan penghayatan atas sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh manusia. Sementara itu, Chabib Thoha menjelaskan bahwa nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti, yaitu manusia sebagai pihak yang meyakininya. Dengan demikian, nilai dapat dipahami sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menjadi acuan tingkah laku manusia

<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, nilai-nilai agama dapat dimaknai sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada ajaran agama dan dijadikan dasar oleh manusia dalam menjalani kehidupan demi mencapai tujuan tertinggi, yakni mengabdi kepada Allah SWT. Dalam konteks Islam, nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus ditanamkan dan dibentuk melalui proses pendidikan yang terencana.<sup>60</sup>.

Pendidikan merupakan cara atau alat yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam. Salah satu bentuknya adalah pengajaran yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan formal. Nilai-nilai Islam tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus diinternalisasi dan diamalkan melalui proses pendidikan yang menyentuh aspek kognitif,

---

<sup>59</sup> Rahmat Hidayat, *Core Ethical Values Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam*.

<sup>60</sup> Muhsinin, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islam Untuk Membentuk Karakter Siswa yang Toleran*, 2013, VIII.

afektif, dan psikomotorik<sup>61</sup>. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW nilai-nilai Islam disebarluaskan melalui dakwah dan halaqah, maka pada masa kini proses tersebut dapat dilakukan melalui sekolah sebagai institusi pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi muslim yang utuh baik jasmani maupun Rohani menuju insan kamil, yaitu manusia sempurna yang hidup secara seimbang karena ketakwaannya kepada Allah SWT<sup>62</sup>.

Zakia Daradjat menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam akan tercapai apabila dirumuskan secara sistematis dalam kurikulum yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan instruksional. Dengan demikian, pendidikan agama Islam perlu direncanakan dan diimplementasikan secara terstruktur dalam sistem pendidikan nasional<sup>63</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum dan lingkungan belajar dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembentukan karakter siswa yang unggul secara moral<sup>64</sup>.

Dalam pembahasan ini, penanaman nilai-nilai Islam difokuskan pada pelaksanaannya di sekolah umum, yaitu sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Di sekolah umum di Indonesia,

---

<sup>61</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm 30

<sup>62</sup> Puspitasari and others, *Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religious Peserta Didik.*

<sup>63</sup> Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 31-33

<sup>64</sup> Yustiasari Liriwati Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau and Abdallah Al-Shreifeen, ‘Integration of Islamic Values Into the National Education Curriculum’.

pendidikan agama Islam diberikan dalam bentuk mata pelajaran khusus yang terstruktur<sup>65</sup>.

### **b. Pendidikan Agama Islam di Pendidikan Formal**

Menurut Ditbinpaisun pendidikan Agama Islam adalah upaya bimbingan dan asuhan yang ditujukan kepada peserta didik agar setelah menyelesaikan pendidikannya mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat<sup>66</sup>.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan agama Islam berperan penting dalam membentuk aspek sikap dan nilai, termasuk akhlak dan religiositas peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Materi pendidikan agama harus bersumber dari ajaran agama itu sendiri dan integrasikan oleh pendidik yang memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap ajaran tersebut<sup>67</sup>.

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapainya, pendidikan agama perlu diberikan di semua jenjang dan jenis sekolah,

---

<sup>65</sup> Fahrina Yustiasari Liriwati Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau and Iyad Abdallah Al-Shreifeen, ‘Integration of Islamic Values Into the National Education Curriculum’, *International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL)*, 2.4 (2024).

<sup>66</sup> Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 86-88

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 88-90

serta dimasukkan dalam kurikulum sejak tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.<sup>68</sup>

Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dimulai sejak dini bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Zakia Daradjat usia paling ideal untuk penanaman nilai-nilai Islam adalah sejak usia dini hingga remaja, yang mana usia ini rentang usia anak menempuh pendidikan lingkungan Pendidikan.

### 1) Sekolah Dasar (SD)

Pada jenjang SD (usia ±6–12 tahun), anak berada pada tahap pembentukan kebiasaan dasar dan pemahaman moral awal. Integrasi nilai-nilai Islam di SD menekankan pembiasaan positif dan keteladanan langsung. Penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis pembiasaan merupakan strategi paling efektif di tingkat SD<sup>69</sup>.

Artinya, sekolah membudayakan rutinitas harian yang selaras dengan nilai Islam, sehingga nilai tersebut tertanam melalui praktik berulang<sup>70</sup>. Contoh pembiasaan di SD antara lain: siswa dibiasakan berdoa bersama sebelum dan sesudah pelajaran, mengucapkan salam ketika memasuki kelas, antre dengan tertib, serta melaksanakan ibadah

<sup>68</sup> Akbar Yusgiantara, I Gunarsih, and Siti Basiroh, ‘2024, Pages 6023-6031online) Journal of Education Research’, *Journal of Education Research*, 5.4.

<sup>69</sup> Yusgiantara, Gunarsih, and Basiroh, ‘2024, Pages 6023-6031online) Journal of Education Research’.

<sup>70</sup> Stai Miftahul and others, ‘Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Dalam Perspektif Islam Yudistira’, *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, 2.2 (2024).

seperti shalat dhuha atau dzuhur berjamaah di sekolah. Kegiatan rutin ini menanamkan disiplin spiritual dan etika sejak dini.

Selain pembiasaan, peran guru sebagai teladan sangat dominan di SD. Guru tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi juga menjadi model perilaku bagi murid-muridnya<sup>71</sup>. Misalnya, guru yang selalu bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang kepada siswa secara langsung mengajarkan nilai kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang tersebut. Studi menekankan bahwa guru SD berperan sebagai role model dan fasilitator utama dalam membantu anak memahami serta mempraktikkan nilai agama dan moral sehari-hari<sup>72</sup>. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru dalam mengintegrasikan nilai (misalnya menyisipkan pesan moral dalam cerita, atau menegur dengan bijak saat anak berbuat salah) sangat diperlukan<sup>73</sup>.

Materi pelajaran di SD juga diintegrasikan dengan nilai karakter secara sederhana. Dalam mata pelajaran PAI SD, anak dikenalkan pada kisah-kisah teladan dari Nabi dan sahabat yang mengandung pesan moral seperti kejujuran Nabi Muhammad, ketaatan Nabi Ismail, atau kedermawanan sahabat Abu Bakar. Kisah moral dan dongeng berfigur hewan juga sering digunakan untuk

---

<sup>71</sup> Muslimatur Rodiyah, *The Importance of Islamic Religious Education and Moral Education in Building the Characrer of Primary School Children*, 2023, 01.

<sup>72</sup> Rodiyah, *The Importance of Islamic Religious Education and Moral Education in Building the Characrer of Primary School Children*, 01.

<sup>73</sup> Yustiasari Liriwati Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau and Abdallah Al-Shreifeen, ‘Integration of Islamic Values Into the National Education Curriculum’.

mengillustrasikan konsekuensi baik buruk suatu perbuatan. Pendekatan cerita ini efektif menanamkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kejujuran dengan cara yang menarik bagi anak. Selain itu, pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat memasukkan contoh-contoh berperilaku baik dalam konteks kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, soal cerita matematika yang melibatkan sikap adil dalam berbagi, atau latihan kalimat dalam bahasa Indonesia bertema gotong royong.

Dengan strategi-strategi tersebut, nilai-nilai Islam secara perlahan menjadi bagian dari kepribadian siswa SD. Dampaknya terlihat pada terbentuknya kebiasaan dan sikap dasar yang baik, seperti jujur kepada orang tua dan guru, disiplin datang tepat waktu, patuh terhadap aturan kelas, hormat kepada guru dan teman, serta suka menolong sesama. Karakter yang terbangun di tahap dasar ini akan menjadi fondasi kuat bagi perkembangan moral di jenjang berikutnya. Penelitian Rodiyah dkk. menyimpulkan bahwa model pendidikan agama dan moral di SD efektif membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia, asalkan didukung sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial<sup>74</sup>. Dengan kata lain, sejak SD anak sudah dibiasakan hidup dalam kultur bernaafaskan nilai

---

<sup>74</sup> Rodiyah, *The Importance of Islamic Religious Education and Moral Education in Building the Characer of Primary School Children*, 01.

Islam, sehingga diharapkan perilaku terpuji menjadi bagian dari kepribadiannya. Nilai seperti jujur, tanggung jawab, hormat pada guru, tolong-menolong, dan disiplin ditanamkan melalui kegiatan sederhana sehari-hari di sekolah dasar.

## 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Memasuki jenjang SMP (usia remaja awal), anak mulai mengalami perkembangan kognitif dan sosial yang pesat, serta pengaruh lingkungan luar semakin kuat. Pada tahap ini, pendidikan agama Islam memegang peranan sangat krusial dalam pendidikan karakter di SMP<sup>75</sup>. PAI di SMP tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama (akidah, fikih, sejarah Islam), tetapi menekankan praktik ibadah dan akhlak dalam keseharian siswa. Pemerintah mewajibkan PAI di SMP karena periode ini rawan terjadi krisis identitas remaja; melalui PAI, sekolah berupaya membekali siswa dengan pegangan moral untuk menghadapi pengaruh negatif pergaulan.

Guru PAI dan guru lainnya di SMP diharapkan mengaplikasikan norma-norma agama dalam lingkungan sekolah secara konsisten. Misalnya, SMP seringkali memiliki program ekstrakurikuler keagamaan (Rohani Islam/Rohis), mentoring keagamaan bagi siswa, peringatan hari-hari besar Islam, serta aturan

---

<sup>75</sup> Saleh Siregar, ‘Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 2 Sibolangit’.

kedisiplinan yang bernuansa religius (seperti kewajiban berjilbab bagi siswi Muslim, larangan berkata kotor, dsb.). Penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab bisa melalui tugas-tugas terawasi (misal sistem honor code dalam ujian), sedangkan nilai kasih sayang dan ukhuwah (persaudaraan) diasah melalui kerja kelompok, kegiatan sosial, dan kedulian terhadap teman.

Hasil penelitian Wildan Siregar di SMP Negeri 2 Sibolangit menegaskan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam PAI dan seluruh aktivitas sekolah. Guru PAI di sekolah tersebut merencanakan pembelajaran yang memasukkan nilai karakter di setiap materi. Norma-norma agama diusahakan hadir baik di dalam kelas formal maupun dalam budaya sekolah secara luas. Manajemen sekolah juga dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan moral siswa. Dengan pendekatan holistik ini, PAI berkontribusi besar membentuk siswa SMP berakhlaq, seperti terlihat pada peningkatan sikap religius dan sopan santun di sekolah yang menerapkan program karakter terpadu.

Singkatnya, pada level SMP, penekanan ada pada internalisasi konsisten siswa tidak lagi sekadar dibiasakan, tetapi didorong untuk memahami mengapa nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan hormat itu penting. Guru menjadi pembimbing yang mengarahkan

remaja untuk mempraktikkan ajaran Islam dalam keputusan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Tantangan seperti pengaruh pergaulan negatif, internet, dan masa puber diatasi dengan memperkuat kontrol internal melalui pengajaran agama dan akhlak.

### 3) Sekolah Menengah Atas (SMA)

Di jenjang SMA (remaja akhir menuju dewasa muda), siswa memiliki kapasitas berpikir abstrak dan kritis yang lebih matang. Pada tahap ini, pendidikan karakter Islami diarahkan untuk memantapkan prinsip moral yang akan dibawa siswa menuju kehidupan dewasa. Di SMA, PAI tetap menjadi mata pelajaran wajib, sering kali meliputi kajian akhlak yang lebih mendalam misalnya diskusi etika Islam terhadap isu-isu kontemporer, fiqih muamalah (hubungan sosial ekonomi), dan filsafat moral sederhana.

Sekolah menengah atas, terutama yang berbasis Islam (seperti Madrasah Aliyah atau SMA Islam), biasanya mengembangkan culture sekolah yang kental religius: ada kegiatan halaqah (pengajian kelompok) rutin, kewajiban salat Dzuhur berjamaah di sekolah, hingga pembiasaan membaca Asmaul Husna atau doa bersama setiap hari. Pendekatan pengembangan budaya sekolah (school culture) digunakan untuk menanamkan karakter; artinya, seluruh warga sekolah terlibat membangun iklim yang sesuai nilai Islam. Penelitian di SMA Darussalam Banyuwangi, misalnya, menunjukkan bahwa sekolah

merencanakan implementasi pendidikan karakter dalam PAI secara sistematis mulai dari perencanaan pembelajaran oleh guru, pelaksanaan di kelas, hingga evaluasi yang mengukur aspek sikap. SMA tersebut juga menekankan peran sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, di mana lingkungan sekolah dijaga kondusif agar siswa terbiasa berperilaku sesuai akhlak Islam<sup>76</sup>.

Pada level SMA, siswa diajak lebih aktif berdiskusi dan merefleksikan nilai. Misalnya, ketika membahas kejujuran, siswa SMA dapat diajak menganalisis kasus korupsi dari perspektif nilai Islam untuk menumbuhkan sikap anti-korupsi. Ketika membahas tanggung jawab, mereka bisa dilibatkan dalam proyek layanan masyarakat (bakti sosial) agar merasakan langsung pentingnya berbagi dan peduli. Kegiatan kepemimpinan OSIS juga sering menjadi wadah latihan karakter: OSIS di sekolah berbasis Islam kerap menyusun program kerja yang mengandung misi moral (seperti penggalangan dana kemanusiaan, kajian Islami, mentoring adik kelas, dll.). Dengan demikian, lulusan SMA diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integrity dan akhlak yang baik sebagai bekal di perguruan tinggi atau dunia kerja.

---

<sup>76</sup> Moh Harun Al Rosid, ‘Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Darussalam Blokagung Banyuwangi’, VI No 1:21-43.19784767 (2014).

Secara umum, pendidikan formal SD-SMP-SMA di Indonesia menempatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi pendidikan karakter. Pemerintah melalui Kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter (PPK) juga mendorong sekolah mengintegrasikan nilai religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri dalam pembelajaran. Dalam hal ini, nilai religius mencakup pengamalan ajaran Islam secara kaffah bagi siswa Muslim. Bahkan di negara lain seperti Malaysia, kurikulum pendidikan moral bagi siswa non-Muslim pun dirancang selaras dengan nilai-nilai Islam fundamental supaya selaras dengan konteks Masyarakat<sup>77</sup>. Artinya, nilai universal seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam pendidikan formal banyak bersumber dari etika keagamaan.

Namun, tantangan di pendidikan formal tetap ada, misalnya waktu interaksi terbatas dan rasio guru-siswa yang tinggi membuat penanaman nilai terkadang belum optimal. Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan karakter di sekolah sangat dipengaruhi oleh dukungan pendidikan di luar sekolah.

### c. Dampak Integrasi Nilai-nilai Agama Islam Terhadap Anak Putus Sekolah

---

<sup>77</sup> Vishalache Balakrishnan, ‘Making Moral Education Work in a Multicultural Society with Islamic Hegemony’, *Journal of Moral Education*, 46.1 (2017), pp. 79–87, doi:10.1080/03057240.2016.1268111.

Perkembangan agama pada anak berlangsung melalui pengalaman hidupnya sejak usia dini, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di sekolah. Masa sekolah dasar merupakan periode awal yang sangat penting sebagai fondasi pembentukan sikap dan jiwa keagamaan anak<sup>78</sup>. Tahap ini menjadi waktu yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai Islam sebagai upaya pembinaan kepribadian setelah peran orang tua.

Pembinaan kepribadian anak di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh guru dan tentu saja orang tua. Namun demikian, peran guru agama sangat menentukan dalam membentuk jiwa religius anak. Guru agama tidak hanya mengajarkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga diharapkan mampu memperbaiki perilaku dan karakter anak terutama jika pembinaan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik<sup>79</sup>.

Jika guru agama gagal dalam menjalankan tugas pembinaan jiwa keagamaan anak, maka anak-anak berisiko mengalami krisis identitas dan gejolak emosional saat memasuki usia remaja. Hal ini dapat berujung pada munculnya sikap-sikap negatif dan berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti yang banyak terjadi saat ini. Oleh karena itu, hanya guru agama yang bijak, cakap, dan penuh dedikasi yang mampu mengarahkan anak

---

<sup>78</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 17th ed. (Jakarta, PT BULAN BINTANG, 2010), hlm. 66-67

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69

menuju perkembangan agama yang sehat, bekerja sama dengan guru-guru lain untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung<sup>80</sup>.

Penanaman nilai-nilai agama Islam di sekolah tidak hanya membentuk sikap dan jiwa keagamaan anak, tetapi juga berperan strategis dalam mencegah terjadinya masalah anak putus sekolah. Melalui pembinaan nilai-nilai seperti kesabaran, tanggung jawab, semangat menuntut ilmu, dan penghargaan terhadap pendidikan sebagai bagian dari ibadah, anak didorong untuk memiliki motivasi internal yang kuat dalam menjalani proses belajar.

Dalam konteks ini, guru agama memegang peranan penting sebagai pembimbing spiritual dan moral yang membantu anak memahami makna belajar tidak semata untuk dunia, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Ketika nilai-nilai ini tertanam sejak dini, anak-anak akan tumbuh dengan kesadaran tinggi tentang pentingnya pendidikan, mampu menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah atau terpengaruh lingkungan negatif yang sering menjadi pemicu putus sekolah.

Sebaliknya, ketiadaan pembinaan nilai keagamaan dapat menyebabkan lemahnya karakter, rendahnya minat belajar, dan ketidakmampuan menghadapi tekanan sosial, yang berujung pada keputusan untuk keluar dari sekolah. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 71

agama Islam di sekolah, terutama melalui peran guru agama, merupakan salah satu pendekatan preventif yang efektif dalam mengatasi masalah anak putus sekolah<sup>81</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena tertentu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang terjadi dilingkungan dan masyarakat<sup>82</sup>. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif ini karena metode penelitian ini yang cocok dalam penelitian ini, dengan pendekatan ini fenomena-fenomena yang terjadi bisa dijelaskan secara menyeluruh dengan mendeskripsikan hasilnya untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya<sup>83</sup>.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, mencakup beberapa tempat kunci. Pertama, kantor pemerintah daerah, terutama bagian yang terkait dengan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, menjadi titik awal penting untuk memahami kebijakan dan program yang ada. Selain itu, sekolah-sekolah di Kecamatan Sembilan Koto

---

<sup>81</sup> Rodiyah, *The Importance of Islamic Religious Education and Moral Education in Building the Characer of Primary School Children*, 01.

<sup>82</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

<sup>83</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

adalah tempat penting untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi anak putus sekolah. Pengunjungan ke Pusat Kesejahteraan Anak dan Keluarga (PKLK) lokal juga dapat memberikan informasi tentang program-program spesifik yang ditujukan untuk anak-anak yang berisiko putus sekolah. Interaksi dengan komunitas setempat dan observasi di tempat-tempat publik seperti pasar tradisional, juga penting untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan menggabungkan data dari berbagai lokasi ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan mengurangi tingkat anak putus sekolah di kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Dharmasraya, Sumatera Barat.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, dapat mencakup beberapa jenis data yang penting. Pertama, dokumen-dokumen kebijakan resmi pemerintah daerah, seperti rencana pembangunan daerah, kebijakan pendidikan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan program-program penanggulangan anak putus sekolah. Kedua, data statistik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, yang mencakup

statistik tentang angka partisipasi pendidikan, tingkat kelulusan, dan tingkat putus sekolah di Kecamatan Sembilan Koto.

Selanjutnya, melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan pendidikan, kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan tokoh masyarakat setempat, juga menjadi sumber data yang penting untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan upaya mengatasi anak putus sekolah. Observasi langsung di sekolah-sekolah, pusat kesejahteraan anak dan keluarga, serta tempat-tempat lain di Kecamatan Sembilan Koto juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi lapangan terkait dengan masalah putus sekolah.

Terakhir, data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen tentang pengalaman dan persepsi masyarakat setempat terkait dengan faktor-faktor penyebab putus sekolah dan efektivitas kebijakan yang ada, juga menjadi tambahan sumber data yang berharga bagi penelitian ini. Dengan menggabungkan berbagai sumber data tersebut, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Para informan dari penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang anak putus sekolah. Data dari penelitian ini dikumpulkan dari data primer yang diperoleh melalui

wawancara sehingga mendapatkan informasi secara langsung dari informan penelitian mengenai mengatasi anak putus sekolah. Kemudia data sekunder yang diperoleh dari dokumen, penelitian terdahulu, media massa atau sumber informasi lainnya yang dapat mendukung subjek yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghasilkan data yang valid, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi dari subjek penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif dan akurat tentang fenomena yang diamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Sembilan Koto, pusat kesejahteraan dan keluarga, serta tempat-tempat lain di kecamatan Sembilan Koto untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang kondisi lapangan terkait dengan masalah anak putus sekolah.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan adanya tanya jawab serta bertatap muka dengan informan penelitian. Wawancara bertujuan untuk mengeksplorasi makna dan informasi yang bisa menerangkan mengenai masalah penelitian yang akan

diteliti. Pada penelitian ini yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang dimulai dengan isu penelitian, pada wawancara ini pertanyaan yang diberikan pada narasumber tidaklah sama, setiap narasumber diberikan pertanyaan yang berkesinambungan dengan jawaban mereka. Nara sumber dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan pendidikan seperti dinas pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan tokoh masyarakat setempat, juga menjadi sumber data yang penting untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan upaya mengatasi anak putus sekolah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dan penguat data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi ini adalah catatan peristiwa baik dalam bentuk tulisan, peraturan, kebijakan, sejarah, dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini mencakup beberapa jenis data yang penting sebagai berikut: *Pertama*, dokumen-dokumen kebijakan resmi pemerintah daerah, seperti rencana pembangunan daerah, kebijakan pendidikan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan program-program penanggulangan anak putus sekolah. *Kedua*, data statistik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, yang mencakup statistik tentang angka partisipasi

pendidikan, tingkat kelulusan, dan tingkat putus sekolah di Kecamatan Sembilan Koto.

#### **d. Trigulasi Data**

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada<sup>84</sup>.

### **5. Teknik Analisis Data**

Menurut Bodgan & Biklen tindakan dalam menganalisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan langkah penting yang dilakukan oleh peneliti untuk menyederhanakan informasi yang rumit. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih hal-hal penting dari data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah agar peneliti tetap fokus pada topik penelitian dan menghindari informasi yang tidak relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah memahami data dan membuat kesimpulan yang lebih kuat.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses yang penting dalam penelitian dimana informasi yang terkumpul disusun secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Tujuan penyajian data adalah untuk memperoleh gambaran keseluruhan yang jelas.

---

<sup>84</sup> Ifit Novita Sari and Et.al, *Merode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022).

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara temuan dengan teori atau konsep yang telah diterapkan dalam penelitian tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi kedalam 4 pokok bahasan yang akan menjadi gambaran umum dari isi tesis ini. Pada bab pertama pendahuluan membahas latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kemudia sub bab berikutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini, kemudia selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, selain itu bagian ini memuat kajian Pustaka, dilanjukan dengan metode penelitian serta jadwal penelitian.

Bab kedua berisi deskripsi wilayah yang terdiri dari gambaran umum dari kabupaten Dharmasraya, bagian ini tidak dapat dipisahkan kaena menjadi satu kesatuan utuh, kemudia gambaran umum kecaamaan Sembilan Koto, sub judul berikutnya membahas kondisi Pendidikan di kecamatan Sembilan Koto dan tantangan dan masalah Pendidikan di kabupaten Dharmasraya khususnya di kecamatan Sembilan Koto.

Pada bab ketiga dibahas mengenai hasil analisis penelitian dan pembahasan yang memuat hasil penelitian, pembahasan dan temuan yaitu penyelidikan data ATS di Kecamatan Sembilan Koto dari semua jenjang

Pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Kemudian menganalisis faktor penyebab ATS dan dilanjutkan dengan pembahasan perhatian pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah tersebut dan peran Pendidikan Agama Islam.

Bab IV berisi penutup yang menyajikan simpulan dari seluruh rangkaian penelitian mulai dari identifikasi urgensi masalah, landasan teori, kerangka konseptual, metodologi yang digunakan, hingga hasil analisis dan implikasinya sebagai gambaran holistik permasalahan di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya, bab ini merumuskan rekomendasi kebijakan baik bagi pemerintah daerah dan guru di sekolah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan dan Nilai-nilai Agama Islam di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya telah diwujudkan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun, alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan, serta program bantuan pendidikan seperti BOS daerah, beasiswa, dan bantuan seragam. Namun, peran tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan kebijakan umum, belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti faktor rendahnya motivasi belajar, jarak sekolah yang jauh, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Kedua, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Kecamatan Sembilan Koto sudah dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah, distribusi guru, serta program bantuan biaya pendidikan. Akan tetapi, pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal karena distribusi guru PAI dan tenaga pendidik lain masih belum merata, fasilitas

pendidikan di daerah terpencil masih minim, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak masih rendah.

Ketiga, penerapan nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan di sekolah-sekolah Kecamatan Sembilan Koto sudah berjalan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), namun implementasinya masih terbatas pada aspek kognitif. Guru PAI belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai agama Islam dalam bentuk motivasi, pembinaan akhlak, dan kesadaran belajar siswa. Padahal, integrasi nilai-nilai Islam sangat penting dalam mencegah anak putus sekolah, karena dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban agama sekaligus jalan untuk meraih kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.

## B. SARAN

### 1. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dikembangkan lebih jauh untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan utama penelitian ini adalah keterbatasan geografis dan sampel penelitian dimana penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten Dharmasraya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah studi agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait peran pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah. Penelitian lanjutan dapat dilakukan secara

komparatif antar kecamatan atau kabupaten untuk melihat perbedaan pendekatan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk mengekplorasi secara mendalam interaksi, dinamika, dan pengaruh aktor (Pemerintah, masyarakat, tokoh adat seperti niniak mamak dan tokoh agama) dalam proses pembuatan kebijakan terkait anak putus sekolah di kabupaten Dharmasraya dan pengaruh mereka dalam implementasi kebijakan.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum tergalinya secara mendalam perspektif anak dan orang tua. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dari sudut pandang keduanya agar memperoleh gambaran yang lebih utuh. Keterlibatan anak dan orang tua sebagai subjek penelitian juga perlu dioptimalkan guna mengungkap faktor-faktor internal, seperti motivasi dan hambatan pendidikan, secara lebih mendalam.

Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan studi kasus yang lebih mendalam terhadap program-program konkret seperti beasiswa, sekolah terbuka, atau program kejar paket, guna menilai secara langsung dampaknya terhadap anak-anak yang kembali ke dunia pendidikan.

Di samping itu, pendekatan nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan hendaknya diintegrasikan secara lebih terukur, melalui indikator-indikator yang konkret dalam aspek spiritual, moral, dan sosial, agar tidak bersifat

normatif semata. Dengan pendekatan yang lebih luas, mendalam, dan terukur, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung kebijakan pemerataan pendidikan yang adil dan berbasis nilai di daerah.

Untuk Upaya pencegahan anak putus sekolah sehingga terwujud pendidikan yang merata dan berkualita maka saya memberi saran sebagai berikut:

## **2. Saran untuk Pemerintah Daerah**

Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk merumuskan kebijakan khusus yang lebih operasional dan menyentuh akar persoalan, misalnya melalui program beasiswa berkelanjutan, sosialisasi pentingnya pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang rentan putus sekolah. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan agar pembinaan nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan pendidikan formal. Evaluasi rutin dan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan agar program yang ada lebih tepat sasaran.

## **3. Saran untuk Guru dalam Penerapan Nilai-nilai Agama Islam**

Bagi guru PAI, disarankan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan dimensi afektif dan motivasi belajar. Guru PAI perlu menjadi

motivator sekaligus teladan bagi siswa dengan menanamkan kesadaran bahwa pendidikan adalah bagian dari ibadah dan jalan menuju kesejahteraan hidup. Selain itu, guru PAI diharapkan mampu membangun kolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan mendukung anak untuk tetap melanjutkan pendidikan.



## Daftar Pustaka

- Ahmad Mukhasin, and others, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan Di MTs PAB 2 Sampali’, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2.1 (2023), pp. 84–97, doi:10.55606/jubpi.v2i1.2446
- Ainun Nikmah, Farida, Nanda Tri Wardani, and Nurul Matsani, ‘Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah?’, *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4.2 (2020) [www.journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik](http://www.journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik)
- Arsita, Elmi, and Muhammad Ilyas, ‘Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)’, 9.1 (2022), pp. 43–48 <<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>>
- Awaru, A. Octamaya Tenri, Darman Manda, Indriani Indriani, and Najamuddin Najamuddin, ‘Menggali Akar Permasalahan Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Pesisir: Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan’, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18.1 (2023), 136 <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.45440>>
- Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya, ‘Data Anak Putus Sekolah’, *Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya*, 2024
- Berangka, Dedimus, ‘Implikasi Pendidikan Anak Dalam Keluarga Terhadap Angka Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Maro Distrik Merauke’, *Jurnal Masalah Pastoral*, 10.2 (2022), 44–59 <<https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.62>>
- Budi Winarto, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Press, 2008)
- Bae, Sung Man, ‘Long-Term Effect of Adverse Childhood Experiences, School Disengagement, and Reasons for Leaving School on Delinquency in Adolescents Who Dropout’, *Frontiers in Psychology*, 11 (2020), doi:10.3389/fpsyg.2020.02096
- Balakrishnan, Vishalache, ‘Making Moral Education Work in a Multicultural Society with Islamic Hegemony’, *Journal of Moral Education*, 46.1 (2017), pp. 79–87, doi:10.1080/03057240.2016.1268111
- Christi Rolos, Meysi, Johny H Posumah, and Very Y Londa, ‘Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara.’, *JAP*, VIII.113 (2022)
- Contreras-Villalobos, Tabata, Enrique Baleriola Escudero, and Verónica López Leiva, ‘Digging and Building: How Transformative Mixed-Methods Research Contributes to Explaining and Responding to Educational Exclusion and School Dropout’, *Methods in Psychology*, 11 (2024),

- doi:10.1016/j.metip.2024.100170
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, 17th ed. (PT BULAN BINTANG, 2010)
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, 10th ed. (PT Bumi Aksara, 2012)
- Darsyah, Syukron, and others, ‘At-Thullab: Jurnal Of Islamic Studies Kebijakan Dalam Pendidikan’
- Desimaria, Maharina, and Amy Yayuk Sri Rahayu, ‘Reconnoitring Decentralization Policy of Education in Indonesia’, *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14.1 (2022), pp. 1019–28, doi:10.35445/alishlah.v14i1.1892
- Doll, Jonathan Jacob, Zohreh Eslami, and Lynne Walters, ‘Understanding Why Students Drop out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed or Pulled, Or Do They Fall out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative Studies’, *SAGE Open*, 3.4 (2013), doi:10.1177/2158244013503834
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara, ‘Kartu Indonesia Pintar’, October 2024 <[disdik.hsu.go.id](http://disdik.hsu.go.id)>
- Dwi Hestiana, Syafira, and others, *Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SDN 34/I Teratai Kata Kunci*, 2023 <<http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>>
- ‘Economic Impacts of Dropouts’, *National Dropout Prevention Center*, 2022
- Et.al, Ifit Novita Sari and, *Merode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022)
- Fauzi, Ahmad, Andi Gau Kadir, and Andi Murfhi, ‘Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.8 (2012), 85–96
- Febriana, Mutia, and Mohammad Ridwan Rangkuti, ‘Koordinasi Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Deli Serdang’, *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14.2 (2023), 173–87 <<https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.407>>
- Ferdiansyah, Reza, Wahudu Ilattaybi Minal Qauli, and Widya Ayu Syahputri, *Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 2024, viii
- G.S. Backer, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (Chicago Amerika Serikat, 1966)
- Gs, S., & Rangga, K. K. (2015). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat: konsep, teori dan aplikasinya di era otonomi daerah. Graha Ilmu.
- Gulo, Yorizal Tri Marzuki, Beby Masitho Batubara, and Nina Angelia, ‘Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah Di Kampung Nelayan’, *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9.2 (2021), 1–8 <<https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5221>>
- González-González, Daniel, and others, ‘The Impact of Academic Dropout at the University of Granada and Proposals for Prevention12’, *Frontiers in Education*, 8 (2023), doi:10.3389/feduc.2023.1110491

- González-Rodríguez, Diego, María José Vieira, and Javier Vidal, ‘Factors That Influence Early School Leaving: A Comprehensive Model’, *Educational Research* (Routledge, 3 April 2019), pp. 214–30, doi:10.1080/00131881.2019.1596034 <https://dropoutprevention.org/>,
- Harun Al Rosid, Moh, ‘Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA DARUSSALAM Blokagung Banyuwangi’, VI No 1:21-43.19784767 (2014)
- Hidayat, Rahmat, *Core Ethical Values Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam*
- Hasmidah, Rahmadania, ‘Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya’, 2021
- Herri Gunawan, ‘Faktor Penyebab Dan Dampak Anak Putus Sekolah( Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat SLTP Dan SLTA Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat’, 2019
- Hidayat, Dayat, *KEBIJAKAN DESENTRALISASI BIDANG PENDIDIKAN Decentralization Policy on Education Sector*
- Ilham, Dodi, and others, *PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI INDONESIA THE GOVERNMENT'S ROLE IN ENCOURAGING THE QUALITY OF EDUCATION SERVICES IN INDONESIA*, 2023, v
- Kusuma Dewi, Dian S, *Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi (Samudra Biru (Anggota IKAPI)*, 2022)
- Madani, Muhlis, and Risfaisal Risfaisal, ‘Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah’, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4.2 (2017), 184–93 <<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.500>>
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989)
- Miftahul, Stai, and others, ‘Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Dalam Perspektif Islam Yudistira’, *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, 2.2 (2024)
- Muhsinin, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islam untuk Membentuk Karakter Siswa yang Toleran*, 2013, viii
- Miftuhin, 1. Arif, ‘Identifikasi Penyebab Enam Anak Putus Sekolah Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali’, 2017
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Muttaqin, Tatang, and others, ‘The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia’, in *Decentralization and Governance in Indonesia* (Springer International Publishing, 2015), pp. 79–103, doi:10.1007/978-3-319-22434-3\_4
- Na, Chongmin, ‘The Consequences of School Dropout among Serious Adolescent Offenders: More Offending? More Arrest? Both?’, *Journal of*

- Research in Crime and Delinquency*, 54.1 (2017), pp. 78–110,  
doi:10.1177/0022427816664118
- Ngwakwe, Collins C, *A Review of Causes of School Droupouts in Brics Countries: A Souts African Case, Corporate Ownership & Control*, 2014, xii
- Rawls, John, *A THEORY OF JUSTICE* (America, 1971)
- Rian Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negera-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Sukarelawan, Peran, Terhadap Anak, and Putus Sekolah, ‘, Mujizatullah3 Nur’, XI (2023), 297–303
- Sunida, Wan, ‘Peran Aktor Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kepulauan Meranti’, 3 (2023)
- Theodore W. Schultz, *InvestmentHumanCapital* (1961)
- Wildatu Syarofah, ‘Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Dusun Krajan Desa Sembulung Kecamatan Cluring’, *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 2.2 (2021), 208–16 <<https://doi.org/10.46838/jbic.v2i2.108>>
- Yaneri, Ahmad, Vivi Suviani, and Nike Vonika, ‘Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin Di Kampung Lio Kota Depok)’, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 4.1 (2022), 76–89 <<https://doi.org/10.31595/lindayasos.v4i1.554>>
- Pemerintah, Peran, and others, *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi*
- Rafiu Nurul Huda, Gandung, Romy Hermawan, and Oscar Radyan Danar, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang)*, JAP, vi <<http://www.harianterbit.com>>
- Sipuan, Sirajuddin, and Suradi. A, ‘Perencanaan, Implementasi, Dan Evaluasi Profesi’, AKSARA: *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 373, 09.1 (2023), doi:10.37905/aksara.9.1.373-384.2023
- Tawa, Angelika Bule, *KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKOLAH DASAR*
- <https://kuliahditurki.org/>, ‘Apa Saja Dampak Bagi Anak Yang Putus Sekolah?’, *Kuliah Di Turki: Informasi Menarik Seputar Kuliah Di Turki*, January 2025
- <https://www.kompasiana.com/>, ‘Dampak Negatif Dan Konsekuensi Jangka Panjang Dari Tingginya Angka Putus Sekolah’, *Https://Www.Kompasiana.Com/*, May 2023
- Puspitasari, Novi, and others, *Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*
- Rodiyah, Muslimatur, *The Importance of Islamic Religious Education and Moral Education in Building the Character of Primary School Children*, 2023, 01
- Saleh Siregar, Wildan, ‘Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 2 Sibolangit’, *Manajia: Journal of Education*

- and Management*, 1.2 (2023), p. 87, doi:10.61166/manajia.v1i2.13
- Setiawan, Endry, Ninik Handayani, and Ranto Setiyono, ‘Pemerataan Akses Pendidikan’, 2.4 (2024), pp. 29–38, doi:10.61132/sadewa.v2i3.1200
- Sira Torsina Sihombing, Riris, and others, *Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia, Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 2022, i
- Widiastuti, Ika, ‘Assessing the Impact of Education Policies in Indonesia: Challenges, Achievement, and Future Direction’, *Jurnal Pendidikan*, 17.2 (2025), pp. 1955–64, doi:10.35445/alishlah.v17i2.6803
- Winardi, Winardi, ‘Decentralization of Education in Indonesia—A Study on Education Development Gaps in the Provincial Areas’, *International Education Studies*, 10.7 (2017), p. 79, doi:10.5539/ies.v10n7p79
- Wulandari, Febi, and others, *Evaluation of the Policy of the Five Flagship Programs of Regent Joko Sutopo in Wonogiri Regency in 2016-2020* <<https://www.fisip.undip.ac.id>>
- Yusgiantara, Akbar, I Gunarsih, and Siti Basiroh, ‘2024, Pages 6023-6031online) Journal of Education Research’, *Journal of Education Research*, 5.4
- Yustiasari Liriwati Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau, Fahrina, and Iyad Abdallah Al-Shreifeen, ‘Integration of Islamic Values Into the National Education Curriculum’, *International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL)*, 2.4 (2024)

